

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap promosi judi online melalui media sosial di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perkembangan teknologi dan penggunaan platform digital yang semakin pesat. Hukum yang ada, seperti UU ITE, belum cukup untuk mengatur secara detail kendali promosi judi online di media sosial. Faktor seperti penggunaan platform internasional, akun anonim, dan strategi pemasaran tersembunyi melalui konten hiburan semakin memperumit situasi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan transparan, disertai pembaruan regulasi secara berkala agar relevan dengan perkembangan teknologi. Upaya preventif seperti pemblokiran situs, peningkatan literasi digital, dan penegakan hukum tegas terhadap pelaku promosi judi online, termasuk influencer, sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan dunia maya.

Di tingkat internasional, negara-negara seperti Singapura dan Australia telah mengambil langkah tegas dalam mengatur promosi judi online. Singapura menerapkan pendekatan restriktif melalui regulasi seperti Remote Gambling Act dan Gambling Control Act, yang diawasi oleh Gambling Regulatory Authority of Singapore (GRASA). Langkah ini memastikan penyedia layanan media sosial dan individu yang terlibat dalam promosi judi online mematuhi hukum yang berlaku, dengan hukuman berat bagi pelanggar. Sementara itu, Australia mengandalkan Interactive Gambling Act 2001 dan kerja sama dengan Australian Communications and Media Authority (ACMA) untuk melarang promosi judi online melalui platform digital. Kedua negara juga menekankan perlindungan konsumen dan koordinasi internasional untuk mengatasi perjudian online secara global. Dengan regulasi yang ketat dan kerja sama yang terkoordinasi, Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk memperkuat penegakan hukum dalam menangani promosi judi online dan

melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak buruk perjudian ilegal.

## **B. SARAN**

Pemerintah Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk menangani promosi judi online, terutama yang dilakukan oleh influencer di platform digital. Langkah utama mencakup penguatan regulasi yang mengatur larangan dan sanksi terkait promosi judi online, melibatkan kewajiban platform digital untuk memantau, memblokir situs, dan melaporkan konten ilegal. Kerja sama lintas lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, serta Otoritas Jasa Keuangan harus ditingkatkan, termasuk untuk pemblokiran situs dan penelusuran transaksi keuangan mencurigakan. Edukasi publik melalui kampanye literasi digital yang menargetkan berbagai kelompok usia, terutama remaja dan pengguna aktif media sosial, juga menjadi elemen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko finansial dan dampak sosial perjudian.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten harus menjadi prioritas, termasuk terhadap selebritas dan influencer yang terlibat dalam promosi judi online. Prosedur verifikasi dan penanggungjawaban yang jelas bagi pemilik akun media sosial berpengaruh diperlukan untuk memastikan hukum berjalan efektif. Studi komparatif dengan negara lain seperti Singapura dan Australia menunjukkan pentingnya pendekatan preventif disertai sanksi tegas untuk pelanggar. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara tersebut, seperti mekanisme pemblokiran dan pengawasan platform digital, Indonesia dapat memperkuat tata kelola internet yang sehat, mencegah perilaku menyimpang, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian.